

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Krisis keuangan yang baru-baru ini terjadi membawa dampak bagi industri perbankan di Indonesia, diantaranya banyak bank yang mengalami masalah likuiditas. Peningkatan risiko likuiditas memberikan tekanan pada kondisi perbankan. Tekanan likuiditas ini muncul tidak hanya karena imbas dari krisis global, namun juga karena tingginya pertumbuhan kredit sampai dengan Oktober 2008 yang sebagian besar menggunakan dana *secondary reserves* dibandingkan dengan pembiayaan yang berasal dari dana pihak ketiga (BI, 2009). Artinya bank yang seharusnya memiliki fungsi sebagai perantara dengan menyalurkan dana dari masyarakat kepada masyarakat tersebut perannya tidak berjalan dengan baik. Ketika pertumbuhan risiko kredit tinggi, bank sebagai kreditur tidak mampu menghimpun dana dari debitur sehingga pembiayaan tidak lagi berasal dari dana pihak ketiga, namun menggunakan dana cadangan sekunder yaitu dengan aset bank yang ditanamkan pada surat berharga jangka pendek yang mudah dikonversi menjadi uang tunai (sumber: Kamus BI). Hal inilah yang kemudian menyebabkan masalah likuiditas pada bank dan menjadikan risiko kredit sebagai salah satu penyebab terjadinya ketidakstabilan keuangan dan ekonomi.

Meskipun krisis keuangan global dimulai sejak tahun 2007, namun akar permasalahan dari krisis tersebut diyakini telah muncul sejak beberapa tahun sebelumnya. Banyak penelitian yang telah dilakukan namun tidak ada hasil yang

disepakati diantara para ekonom (Al-Khouri, 2012). Berdasarkan fenomena tersebut, ada faktor yang dianggap layak untuk dikaji yaitu tentang standar mekanisme tata kelola perusahaan, seperti struktur kepemilikan dan kompetisi pada industri perbankan yang dapat mempengaruhi sikap pengambilan keputusan, termasuk sikap pengambilan keputusan mengenai manajemen risiko pada bank. Sikap dan keputusan dalam pengambilan risiko oleh manajer bank sangat penting karena bisa menentukan dan membawa bank-bank tersebut pada salah satu yaitu keberhasilan atau kegagalan bank (Al-Khouri, 2012).

Manajer memiliki kewajiban untuk memaksimalkan kesejahteraan pemilik perusahaan dan pemegang saham yang mengharapkan perusahaan dapat menghasilkan laba yang tinggi dengan tingkat risiko yang rendah, namun disisi lain manajer juga mempunyai kepentingan untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka sendiri. Konflik kepentingan ini sering disebut dengan masalah keagenan (*agency problem*). Masalah keagenan juga dapat terjadi diantara para pemegang saham. Di dalam suatu perusahaan seringkali terdapat berbagai kelompok pemegang saham yang memiliki kepentingan berbeda-beda. Biasanya terdapat kelompok pemegang saham mayoritas dan minoritas. Pemegang saham minoritas memiliki kedudukan yang kurang penting dalam pengambilan keputusan pada rapat umum pemegang saham (RUPS) karena jumlahnya yang banyak dan tersebar sehingga seringkali suaranya tidak terwakili (Ardianto, 2010). Oleh karena itu, pengambilan keputusan selalu dikuasai dan mendapat intervensi dari pemegang saham mayoritas.

Pemilik perusahaan, para pemegang saham, dan manajer dapat mempelajari dan memahami teori yang menjelaskan tentang masalah keagenan tersebut yang dikenal dengan Teori Keagenan (*Agency Theory*). Dalam teori keagenan yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976), hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk melaksanakan beberapa jasa dan mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan pada agen tersebut. Adanya pendelegasian wewenang tersebut menimbulkan pemisahan fungsi kepemilikan dengan pengambilan keputusan yang kemudian dapat menyebabkan konflik sehingga akan timbul pula *agency cost* yaitu biaya yang akan ditanggung oleh *principal* dan agen akibat adanya masalah keagenan.

Struktur kepemilikan merupakan suatu mekanisme yang dapat mengurangi konflik antara manajemen dan pemegang saham sehingga *agency costs* dapat dikurangi (Faisal, 2004 dalam Saputro dan Syafruddin, 2012). Berbagai jenis struktur kepemilikan memiliki pengaruh yang berbeda-beda terhadap pengambilan risiko pada perusahaan. Bank yang dimiliki oleh kelompok tertentu atau jenis pemegang saham tertentu akan memiliki kinerja dan pengambilan keputusan yang lebih baik dari kelompok bank lainnya. Menurut Al-Tamimi dan Jellali (2013) terdapat tiga jenis struktur kepemilikan antara lain kepemilikan pemerintah, kepemilikan institusional, dan kepemilikan swasta atau publik.

Perusahaan dengan kepemilikan swasta atau publik diharapkan lebih konservatif dalam pengambilan keputusan dan mengambil risiko lebih rendah (Al-Tamimi dan Jellali, 2013). Dengan keikutsertaan masyarakat luas menjadi pemilik

bank, maka kontrol masyarakat terhadap kegiatan operasional bank tersebut akan semakin besar. Jadi sebagai konsekuensinya, manajemen bank akan lebih profesional dalam menjalankan fungsinya dan bank diharapkan mampu melaksanakan *good corporate governance* yang kemudian akan meningkatkan kinerja bank (Hadad, dkk., 2003). Sehingga kesejahteraan masyarakat sebagai pemegang saham dapat terpenuhi. Sedangkan Jensen dan Meckling (1976) memberi pernyataan tentang kepemilikan institusional bahwa kepemilikan institusional pada perusahaan dapat meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Menurut Janicki dan Wunnava (2004) dalam Chou dan Lin (2011), kepemilikan institusional mampu mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Investor institusional memiliki lebih banyak informasi mengenai bank tersebut dan biasanya turut serta berperan dalam pengambilan keputusan pada manajemen bank dalam RUPS. Semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku *opportunistic* oleh manajer bank.

Selama krisis keuangan, banyak bank mendapat dukungan dari pemerintah diantaranya jaminan utang, kemudahan akses likuiditas, dan suntikan modal. Hal ini menyebabkan peningkatan peran oleh pemerintah dalam kepemilikan bank. Tingginya kepemilikan pemerintah pada bank berpotensi menimbulkan konflik mengingat peran pemerintah sebagai regulator dan pengawas pasar keuangan (Al-Khouri, 2012). Hal yang mungkin juga akan terjadi yaitu pemerintah menggunakan kekayaan perusahaan untuk tujuan sosial dan politik. Jika bank

mengalami kegagalan maka akan memalukan bagi pemerintah. Hal ini dapat mengancam kesejahteraan bank dan mendorong manajer untuk mengambil risiko yang berlebihan sebagai akibat dari intervensi pihak pemerintah.

Perbankan di Indonesia telah mengalami perubahan struktural dari tahun ke tahun yang menyebabkan terjadinya perubahan mendasar bagi perilaku perbankan itu sendiri. Perubahan struktur perbankan di Indonesia salah satunya disebabkan oleh adanya deregulasi yang dimulai pada 1 Juni 1983 atau yang disebut dengan Paket Juni 1983 (Pakjun 83) yaitu kemudahan bagi bank untuk menentukan sendiri suku bunga deposito dan dihapuskannya campur tangan Bank Indonesia pada bank dalam penyaluran kredit, sehingga bank dapat meningkatkan penghimpunan dana dari masyarakat secara drastis. Langkah ini bertujuan untuk merangsang pertumbuhan perbankan di Indonesia. Kemudian ditambah dengan adanya Paket Oktober 1988 (Pakto 88) yaitu kemudahan dalam pendirian bank baru hanya dengan modal 10 miliar rupiah (Tempo, 1997). Hal ini mengakibatkan jumlah bank yang bertambah sangat pesat sehingga kompetisi perbankan menjadi semakin tinggi. Tingginya kompetisi pada pasar perbankan dapat memengaruhi pengambilan keputusan oleh bank, terutama terkait dengan risiko. Ketika bank berada dalam pasar yang kompetitif dimungkinkan akan mendorong bank untuk mengambil risiko yang lebih tinggi, mengingat juga bahwa Bank Indonesia telah menghapus campur tangan pada bank dalam penyaluran kredit. Sehingga dapat diasumsikan bahwa semakin tinggi kompetisi perbankan akan semakin tinggi pengambilan risiko oleh bank. Asumsi ini didukung oleh pernyataan Al-Khoury (2012) bahwa semakin tinggi kompetisi akan semakin tinggi pula risiko bank.

Penelitian mengenai permasalahan ini sangat menarik untuk dilakukan karena penelitian sejenis ini masih sedikit. Penelitian yang dilakukan kebanyakan hanya menguji pengaruh struktur kepemilikan dan persaingan terhadap kinerja perusahaan, bukan pada risiko bank. Padahal perilaku pengambilan risiko oleh manajer bank sangat penting karena dapat menentukan dan membawa bank pada salah satu keberhasilan atau kegagalan bank-bank tersebut. Sehingga dalam penelitian ini menguji pengaruh struktur kepemilikan dan persaingan pasar perbankan terhadap risiko pada bank, yaitu risiko kredit.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu: Apakah kepemilikan pemerintah, kepemilikan institusional, kepemilikan swasta, dan kompetisi perbankan berpengaruh terhadap pengambilan risiko kredit pada industri perbankan di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kepemilikan pemerintah, kepemilikan institusional, kepemilikan swasta, dan kompetisi perbankan terhadap pengambilan risiko kredit pada industri perbankan di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Memberikan bukti empiris ada tidaknya pengaruh struktur kepemilikan baik kepemilikan pemerintah, kepemilikan institusional, dan kepemilikan swasta, serta kompetisi perbankan terhadap pengambilan risiko kredit pada bank.
2. Memberikan kontribusi praktis bagi manajemen perusahaan tentang sikap dan keputusan dalam pengambilan risiko kredit.
3. Sebagai bahan referensi atau acuan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini.

1.5 Sistematika Skripsi

Penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai isi skripsi:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini secara ringkas menjelaskan mengenai latar belakang perlunya dilakukan penelitian mengenai pengaruh struktur kepemilikan dan kompetisi perbankan terhadap pengambilan risiko kredit pada bank, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mengkaji teori-teori yang akan digunakan sebagai landasan pemikiran dalam penelitian ini, diantaranya teori risiko bank, risiko

kredit pada bank, basel I, teori keagenan, struktur kepemilikan, dan kompetisi perbankan.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari penjelasan tentang pendekatan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional variabel, jenis dan sumber data yang dibutuhkan, prosedur penentuan sampel, serta teknik analisis data dengan menggunakan uji asumsi klasik dan uji hipotesis.

BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini mengkaji mengenai gambaran umum subyek penelitian, deskripsi hasil penelitian baik analisis deskriptif dan analisis statistik, pengujian hipotesis, serta pembahasan masalah berdasarkan teori yang relevan untuk mencari jawaban atas rumusan masalah penelitian.

BAB 5 : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian, berisi tentang kesimpulan yang dihasilkan berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, serta saran mengenai penelitian yang telah dilakukan.